

Pengalihan Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Infrastruktur di Desa Kecipir, Kabupaten Brebes

*The Effect of Budget Transfers and Public Accountability on the Infrastructure
Kecipir Village, Brebes Regency*

Muhammad Kuntoro¹, Titi Rahmawati², Dwi Harini³, Muhammad Badrun Zaman⁴, Amelia Sholeha⁵

^{1,2,4,5}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, Indonesia

³Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, Indonesia

e-mail:¹ khoenmuhammad@gmail.com, ² titirahmawati165@gmail.com, ³ dwiHarini707@gmail.com,

⁴ badrunmohamad93@gmail.com, ⁵ amel134@gmail.com,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pengalihan anggaran dan akuntabilitas publik terhadap infrastruktur di Desa Kecipir, Kabupaten Brebes. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Kecipir yang ada di Kabupaten Brebes. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data primer sebagai sumber datanya. Teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan variabel pengalihan anggaran berpengaruh 36% dan secara signifikan mempengaruhi terhadap Infrastruktur di Desa Kecipir. Hal ini diketahui bahwa menurut responden akuntabilitas publik terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan anggaran yang sumber dari anggaran tersebut adalah merupakan dana milik rakyat, variabel akuntabilitas publik berpengaruh 64% dan secara signifikan mempengaruhi terhadap infrastruktur di Desa Kecipir. Hal ini diketahui bahwa menurut responden akuntabilitas publik terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan anggaran yang sumber dari anggaran tersebut adalah merupakan dana milik rakyat.

Kata Kunci: Anggaran, Akuntabilitas, Infrastruktur.

Abstract

This study aims to examine the effect of budget diversion and public accountability on infrastructure in Kecipir Village, Brebes Regency. The population of this study is the people of Kecipir Village in Brebes Regency. This research is a descriptive research with a quantitative approach that uses primary data as a source of data. Data collection techniques in the form of field research (*field research*). The results showed that the budget transfer variable had an effect of 36% and significantly affected the infrastructure in Kecipir Village. It is known that according to respondents, public accountability is related to the government's accountability for budget management whose source of the budget is people's funds, the public accountability variable affects 64% and significantly affects infrastructure in Kecipir Village. It is known that according to respondents, public accountability is related to the government's accountability for budget management, the source of which is people's funds.

Keywords: Budget, Accountability, Infrastructure

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. APBD harus ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum tahun pelaksanaannya dimulai. Oleh karena penyusunan rencana kerja yang akan dibiayai dari APBD dilakukan setahun sebelum pelaksanaannya, maka kemungkinan besar akan terjadi penyesuaian selama pelaksanaannya. Perubahan atau revisi terhadap anggaran yang sedang dilaksanakan pada tahun berjalan merupakan fenomena yang biasa dalam penganggaran di pemerintahan. Secara formal, penyusunan anggaran dan perubahannya diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan daerah. Pengaturan tersebut bersifat mengikat

dan pelaksanaannya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan melalui pelaporan keuangan dan kinerja. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang APBN tahun Anggaran 2020 disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta. UU No. 20 tahun 2019 tentang APBN tahun Anggaran 2020 diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019. UU No. 20 tahun 2019 tentang APBN tahun Anggaran 2020 diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, dan Penjelasan Atas UU No. 20 tahun 2019 tentang APBN tahun Anggaran 2020 diundangkan dan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410. Agar semua orang mengetahuinya. Rancangan UU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam SK DPR No. 53/DPD RI/V/2018-2019, tanggal 18 September 2019. Pembahasan UU ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RKP Tahun 2020 memiliki nilai strategis mengingat dokumen ini disusun pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019, bersamaan dengan penyusunan RPJMN tahun 2020-2024. Dengan demikian, RKP tahun 2020 diharapkan dapat menjembatani RPJMN tahun 2015-2019 dengan RPJMN tahun 2020-2024. Sebagai informasi, dalam postur APBN 2020, pemerintah mengalokasikan transfer ke daerah sebesar Rp784,9 triliun meliputi Dana Bagi Hasil Rp117,6 triliun; Dana Alokasi Umum Rp427,1 triliun; DAK Fisik Rp72,2 triliun; DAK non-Fisik Rp130,3 triliun; Dana Insentif Daerah Rp15 triliun dan dana otsus dan dana Keistimewaan DIY Rp22,7 triliun. DPRD Provinsi Jawa Tengah menyetujui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Perda APBD Jateng Tahun Anggaran 2020 melalui rapat paripurna di Semarang, Selasa (12/11).

Persetujuan sekaligus pengesahan APBD Jateng 2020 itu tertuang dalam penandatanganan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta lima pimpinan DPRD Provinsi Jateng. Sesuai dengan laporan Badan Anggaran yang disetujui oleh Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto dan dibacakan oleh Sekretaris DPRD Jateng Urip Sihabudin menyebutkan jumlah pendapatan pada APBD 2020 sebesar Rp28,3 triliun itu mengalami rasionalisasi dari usulan Gubernur Ganjar Pranowo dalam RAPBD 2020 sebesar Rp28,77 triliun. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan, fasilitas dasar, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM). "Badan Anggaran berpendapat bahwa Raperda tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah," kata Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto saat dalam memimpin rapat paripurna di DPRD Jateng. Menurut dia, Badan Anggaran DPRD Jateng menerima dan menyetujui RAPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan penggeseran maupun rasionalisasi/penyelarasan untuk mendukung kegiatan pembangunan di segala bidang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rasionalisasi dilakukan disejumlah instansi setelah dilakukan rapat dengan komisi-komisi DPRD Jateng dengan jumlahnya sebesar Rp298,6 miliar dengan perincian masing-masing Komisi A rasionalisasi anggaran Rp7,4 miliar, Komisi B (Rp4,5 miliar), Komisi C (Rp154,8 miliar), Komisi D (Rp17 miliar), dan Komisi E (Rp114,7 miliar). Seperti diwartakan, Pemprov Jateng mengusulkan RAPBD Jateng 2020 sebesar Rp28,7 triliun atau naik Rp2,1 triliun dari APBD tahun

lalu sebesar Rp26,6 triliun. Rapat paripurna DPRD dengan agenda Pengambilan Keputusan Atas Raperda Kabupaten Brebes tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes, Teguh Wahid Turmudi dan dihadiri Bupati Brebes, Idza Priyanti. Kegiatan paripurna itu dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. Termasuk pembatasan terhadap jumlah undangan yang hadir. Rapat paripurna juga dapat diikuti secara virtual. Dalam pemaparannya, Bupati Brebes, Idza Priyanti mengatakan, secara garis besar pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun 2020 berkurang sebesar 4,20 persen atau Rp 131.577.925.000. Dari semula sebesar Rp 3.219.412.939.000 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 2.997.835.014.000. "Pendapatan daerah ini rinciannya, PAD semula Rp 398.649.681.000 turun menjadi Rp 363.130.149.000. Kemudian, Dana Perimbangan semula Rp 1.884.536.404.000, setelah perubahan turun menjadi Rp 1.728.146.941.000.

Pendapatan Daerah yang sah semula Rp 846.226.854.000 naik menjadi Rp 906.557.924.000," papar Idza Priyanti. Sedangkan belanja daerah, kata Bupati, juga mengalami penurunan yakni, dari semula Rp 3.270.994.179.000 berkurang 4,43 persen, sehingga setelah perubahan menjadi Rp 3.125.981.682.000. Adapun belanja daerah itu, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 1.824.932.368.000, dan belanja langsung sebesar Rp 1.301.049.314.000. Belanja langsung ini terdiri dari Belanja Pegawai semula Rp 63.989.734.000 naik 27,42 persen menjadi Rp 81.538.546.000. Kemudian, Belanja Barang dan Jasa semula Rp 801.121.247.000 berkurang 4,8 persen menjadi Rp 762.525.653.000. Sedangkan Belanja Modal berkurang dari Rp 536.441.460.000 menjadi Rp 456.985.115.000," ungkapnya. Di sisi lain, untuk Pembiayaan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2020 semula sebesar Rp 141.581.240.000 berkurang sebesar 9,49 persen. Sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp 128.146.668.000. Bagaimana besar pengaruh pengalihan anggaran terhadap infrastruktur di Desa Kecipir, Bagaimana besar pengaruh akuntabilitas publik terhadap infrastruktur di Desa Kecipir Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui besar pengaruh pengalihan anggaran terhadap infrastruktur di Desa Kecipir, untuk mengetahui besar pengaruh akuntabilitas publik terhadap infrastruktur di Desa Kecipir.

KAJIAN LITERATUR

Anggaran yaitu pernyataan dalam kuantitas yang dapat dinyatakan secara formal, disusun secara sistematis, dinyatakan dalam suatu unit moneter, dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang[1]. Anggaran bisa dijadikan sebagai manifestasi dari sebuah rencana yang akan dicapai pada masa yang akan datang serta pada masa yang sama *budget* itu menjadi alat kontrol. Arti infrastruktur yaitu wujud modal publik *public capital* yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan dan lainnya, sebagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah[2]. Pengertian infrastruktur ialah sistem fisik yang menyediakan sarana drainase, pengairan, transportasi, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi[3]. Pengertian infrastruktur ialah suatu sistem yang menunjang sistem sosial dan ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan, dimana sistem ini bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan[4].

Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatannya[5]. Adapun Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara

PENGALIHAN ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP INFRASTRUKTUR DI DESA KECIPIR
KABUPATEN BREBES

(MUHAMMAD KUNTORO, TITI RAHMAWATI, DWI HARINI, MUHAMMAD BADRUN ZAMAN, AMELIA
SHOLEHAH)

periodik. Dari pengertian di atas dapat diambil intinya bahwa akuntabilitas sektor publik memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena penyelenggaraan akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat.

Akuntansi Sektor Publik terkait dengan tiga hal pokok yaitu, penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas[6]. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah maupun publik[7]. Akuntansi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik[8]. Akuntansi sektor publik diidentifikasi sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek kerja sama sektor publik dan swasta[9].

Akuntansi pemerintahan adalah pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah[10]. Akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkat unit pemerintah[11]. Berdasarkan dari beberapa definisi di atas mengenai akuntansi pemerintah, peneliti dapat mengambil kesimpulan, bahwa akuntansi pemerintah adalah akuntansi untuk organisasi *nirlaba* (*nonprofit organization*) yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lain yang tidak bertujuan mencari laba[1].

Definisi akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, asset, dan prosedur akuntansi selain kas[12]. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi keuangan daerah adalah memberikan info kepada para pengambil keputusan dalam suatu entitas atau organisasi pemerintah daerah atau kota.

METODOLOGI PENELITIAN

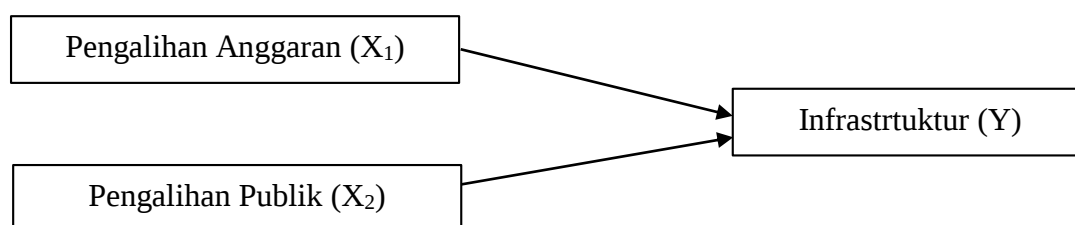
Penelitian ini dilakukan di Desa Kecipir, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dan Kantor Kepala Desa Kecipir yang berlokasi di Jalan Kecipir. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif[13]. Sumber data diperoleh melalui penyebaran kuesioner untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat. Data yang digunakan adalah data contoh untuk diimplementasikan pada aplikasi SPSS. Data tersebut dapat diperoleh melalui responden. Responden yang dipilih adalah responden yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu pemerintah desa selaku tim pelaksana desa. Sebagai responden dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara, dan sumber lainnya yang berupa arsip (dokumen) dari Desa Kecipir, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, yaitu gambaran umum Desa Kecipir serta mempelajari laporan keuangan Desa Kecipir dan ditambah dengan literatur-literatur, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi. Data tersebut selanjutnya diolah menggunakan aplikasi SPSS untuk menghasilkan luaran berupa nilai standar deviasi, varians, uji t satu sampel, uji t sampel berpasangan dan lain-lain. Analisis yang diterapkan adalah deskriptif kuantitatif komparatif yakni: (a) mengumpulkan data yang berkaitan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan; (b)

PENGALIHAN ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP INFRASTRUKTUR DI DESA KECIPIR
KABUPATEN BREBES

(MUHAMMAD KUNTORO, TITI RAHMAWATI, DWI HARINI, MUHAMMAD BADRUN ZAMAN, AMELIA
SHOLEHAH)

mengidentifikasi hambatan hambatan yang ditemui dalam pengelolaan keuangan; (c) mengevaluasi data yang berkaitan dengan akuntansi dan manajemen keuangan; (d) Membandingkan hasil evaluasi dengan teori-teori yang ada; (e) mengusulkan pelaksanaan akuntansi dan pengelolaan keuangan yang baik untuk diterapkan[14].

Operasional variabel ini diperlukan untuk menjabarkan variabel-variabel penelitian ke dalam indikator tertentu untuk memudahkan pengukurannya, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengumpulan data untuk menjawab masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, untuk menghindari kekeliruan dalam menafsirkan masalah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi variabel yang akan diukur, sehingga variabel-variabel yang akan diteliti diberi batasan-batasan secara operasional. Penelitian ini menggunakan tiga variabel agar variabel-variabel penelitian dapat dioperasikan. Sesuai dengan judul penelitian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang harus diteliti, yaitu variabel independen (X_1 dan X_2) sebagai variabel bebas dan variabel dependen (Y) sebagai variabel terikat. Adapun penjelasan untuk setiap variabel sebagai berikut. Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan/dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu infrastruktur. Skala pengumpulan variabel ini adalah skala ordinal dengan memberikan nilai dan jawaban. Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah pengalihan anggaran dan akuntabilitas publik. Skala pengumpulan variabel ini adalah skala likert dengan memberikan nilai pada jawaban.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Variabel X_1 : Pengalihan Anggaran, variabel X_2 : Akuntabilitas Publik, variabel Y Infrastruktur. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengelompokan ke dalam dua golongan yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data segala informasi yang diperoleh, diamati, dan dicatat oleh peneliti langsung dari perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder adalah data atau informasi yang berasal dari media cetak lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sumber data primer dan data sekunder diperoleh dimana data yang diperoleh penulis merupakan data yang diperoleh secara langsung, dengan mengadakan penelitian dan kuesioner pada sub bagian anggaran dan keuangan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Brebes dan ada sebagian data atau informasi yang berasal dari media cetak lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Jenis kuesioner ini adalah kuesioner tertutup. Untuk menunjang hasil penelitian, maka peneliti melakukan pengelompokan data yang diperlukan kedalam dua golongan, yaitu: Populasi adalah: Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan[15]. Berdasarkan pengertian di atas, populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Apabila dikaitkan dengan judul yang diambil penulis yaitu pengaruh pengalihan anggaran dan akuntabilitas publik terhadap infrastruktur di Desa kecipir Kabupaten Brebes, maka yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan warga Desa Kecipir dengan total sebanyak 43 orang.

Tabel 1. Jumlah penduduk desa kecipir

No	Jenis kelamin	Jumlah jiwa	Presentase
1	Laki-laki	2.750	51,28%
2	Perempuan	2.610	48,67%
	Jumlah	5.362	

Sumber: Dispermadesdukcapil Prov. Jateng

Membuktikan kebenaran jawaban yang masih sementara (hipotesis), maka peneliti melakukan pengumpulan data pada objek tertentu[16]. Objek dalam populasi terlalu luas, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan[17]. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling jenuh atau disebut juga sensus dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, istilah lain sampel jenuh adalah sensus[18].

Dalam penyusunan usulan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data adalah studi lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akurat, merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dengan menggunakan usaha-usaha khusus, diantaranya dengan terjun langsung ke instansi melalui metode pengamatan atau observasi. Peneliti melakukan penelitian dengan menguraikan faktafakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarannya secara semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan, dimana usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan. Metode observasi adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung pada 9 objek yang sedang diteliti, diamati atau kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penulisan laporan ini, penulis mengadakan pengamatan langsung nagian anggaran Dinas PUPR Brebes. Metode wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang penulis teliti[19]. Penggunaan kuesioner (angket) adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan serta literatur lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam rangka melakukan pembahasan[20]. Landasan teori ini dijadikan sebagai pembanding dengan kenyataan di perusahaan[21].

PENGALIHAN ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP INFRASTRUKTUR DI DESA KECIPIR
KABUPATEN BREBES

(MUHAMMAD KUNTORO, TITI RAHMAWATI, DWI HARINI, MUHAMMAD BADRUN ZAMAN, AMELIA
SHOLEHAH)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai pengalihan anggaran dan akuntabilitas publik terhadap infrastruktur di Desa Kecipir, Kabupaten Brebes dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2. Uji Validitas Variabel X

		Correlations					
		X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X
X ₁	Pearson Correlation	1	,521**	,461**	,289	,186	,737**
	Sig. (2-tailed)		,000	,002	,067	,243	,000
	N	41	41	41	41	41	41
X ₂	Pearson Correlation	,521**	1	,527**	,449**	,199	,762**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,003	,206	,000
	N	41	42	42	42	42	42
X ₃	Pearson Correlation	,461**	,527**	1	,573**	,216	,781**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000		,000	,165	,000
	N	41	42	43	43	43	43
X ₄	Pearson Correlation	,289	,449**	,573**	1	,017	,643**
	Sig. (2-tailed)	,067	,003	,000		,911	,000
	N	41	42	43	43	43	43
X ₅	Pearson Correlation	,186	,199	,216	,017	1	,474**
	Sig. (2-tailed)	,243	,206	,165	,911		,001
	N	41	42	43	43	43	43
X	Pearson Correlation	,737**	,762**	,781**	,643**	,474**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,001	
	N	41	42	43	43	43	43

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Y

		Correlations					
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y
Y1	Pearson Correlation	1	,383*	,570**	,458**	,537**	,734**
	Sig. (2-tailed)		,011	,000	,002	,000	,000
	N	43	43	43	43	43	43
Y2	Pearson Correlation	,383*	1	,477**	,523**	,602**	,764**
	Sig. (2-tailed)	,011		,001	,000	,000	,000
	N	43	43	43	43	43	43
Y3	Pearson Correlation	,570**	,477**	1	,637**	,616**	,832**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001		,000	,000	,000
	N	43	43	43	43	43	43
Y4	Pearson Correlation	,458**	,523**	,637**	1	,586**	,812**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000		,000	,000
	N	43	43	43	43	43	43
Y5	Pearson Correlation	,537**	,602**	,616**	,586**	1	,827**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	43	43	43	43	43	43
Y	Pearson Correlation	,734**	,764**	,832**	,812**	,827**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	43	43	43	43	43	43

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil pengamatan pada rtabel didapatkan nilai dari sampel (N) = 43 sebesar 0.3008. Merujuk pada hasil dari uji validitas dihasilkan bahwa semua instrumen mulai dari variabel (X) yang terdiri dari X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 semuanya menghasilkan (r hitung) > dari pada r tabel. Selain itu variabel (Y) yang terdiri dari y_1 , y_2 , y_3 , y_4 , y_5 semuanya menghasilkan (r hitung) > dari pada r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini dikatakan valid.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,676	5
,849	5

Dari hasil uji reliabilitas didapatkan semua nilai dari hasil variabel x dan y menghasilkan. Nilai Alpha Cronbach > 0,6. Sehingga dapat disimpulkan semua instrumen dalam penelitian ini reliabel. Hasil uji pengaruh pengalihan anggaran terhadap infrastruktur di Desa kecipir, Kabupaten Brebes dapat dilihat dari uji validitas yang menguji variabel pengalihan anggaran signifikan terhadap Infrastruktur Di Desa Kecipir, Kabupaten Brebes. Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas APBD. Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan 95% yang berarti menggunakan α sebesar 0,05. Hal ini berarti jika nilai p < dari 0,05, maka variabel independen memiliki besaran pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai p regresi untuk variabel independen akuntabilitas publik adalah 0,004 ($p < 0,05$) dengan nilai t hitung yang positif (3,026). Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi yang positif dan signifikan, menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berkorelasi positif dan secara signifikan mempengaruhi terhadap kualitas APBD. Berdasarkan hasil pengujian terhadap variabel yang diajukan dalam penelitian ini secara empiris akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi publik dan APBD pendekatan kinerja berpengaruh terhadap kualitas APBD. Variabel akuntabilitas publik berkorelasi positif dan secara signifikan mempengaruhi terhadap kualitas APBD. Hal ini diketahui bahwa menurut responden akuntabilitas publik terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan anggaran yang sumber dari anggaran tersebut adalah merupakan dana milik rakyat.

Variabel partisipasi masyarakat berkorelasi positif dan secara signifikan mempengaruhi terhadap kualitas APBD. Responden dalam penelitian ini memandang bahwa kualitas APBD akan lebih baik jika terdapat partisipasi aktif dari masyarakat, baik dalam hal penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan. Variabel transparansi publik berkorelasi positif dan secara signifikan mempengaruhi terhadap kualitas APBD. Responden penelitian ini menyatakan bahwa aspek transparansi publik berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengalihan anggaran, akuntabilitas publik terhadap Infrastruktur di Desa Kecipir Kabupaten Brebes. Penelitian dilakukan di Desa Kecipir dengan responden yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, akademisi, mahasiswa dan media masa. yang berada di wilayah Desa Kecipir Kabupaten Brebes. Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan ditemukan hasil sebagai berikut:

PENGALIHAN ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP INFRASTRUKTUR DI DESA KECIPIR
KABUPATEN BREBES

(MUHAMMAD KUNTORO, TITI RAHMAWATI, DWI HARINI, MUHAMMAD BADRUN ZAMAN, AMELIA
SHOLEHAH)

1. Variabel pengalihan anggaran berpengaruh 36% dan secara signifikan mempengaruhi terhadap Infrastruktur di Desa Kecipir. Hal ini diketahui bahwa menurut responden akuntabilitas publik terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan anggaran yang sumber dari anggaran tersebut adalah merupakan dana milik rakyat,
2. Variabel akuntabilitas publik berpengaruh 64% dan secara signifikan mempengaruhi terhadap Infrastruktur di Desa Kecipir. Hal ini diketahui bahwa menurut responden akuntabilitas publik terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan anggaran yang sumber dari anggaran tersebut adalah merupakan dana milik rakyat.

Saran dinas Pendapatan Daerah dan BPKAD Kabupaten Brebes sebaiknya menerapkan kejelasan sasaran anggaran dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sehingga diharapkan akuntabilitas kinerja dapat meningkat, serta sebaiknya mensosialisasikan tujuan penggunaan anggaran dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran serta sebaiknya melakukan penyempurnaan dalam sistem informasi akuntansi keuangan sehingga penyajian informasi lebih tepat, cepat dan bermanfaat secara optimal bagi pengguna informasi.

DAFTAR REFERENSI

- [1] N. Setiawati Azizah Indriyani, Amelia Sholeha, Ely Supratin, "Pengaruh Rasio Lancar, Margin Laba Bersih Dan Tingkat Pengembalian Asset Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Index Lq45 Periode 2012-2016)," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 49–59, 2019.
- [2] R. R. Umamatul Khoeriyah Syariefful Ikhwan, Roby Setiadi, Mohammad Badrun Zaman, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan (Studi pada Bank Umum Go Public Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 81–94, 2019.
- [3] N. Devi Ade Yulian Roby Setiadi, Khalid Iskandar, Mohammad Badrun Zaman, "Pengaruh CAR, NPL, ROA, ROE, dan LDR terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Kasus pada Bank BPR di Wilayah Brebes Periode Tahun 2014-2018)," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 106–119, 2019.
- [4] M. Ayusa Nitasari Andi Yulianto, Amelia Sholeha, Afti Sulastri, "Pengaruh Tuntutan Pendidikan, Pemahaman Akuntansi dan Ukuran Usaha terhadap Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP (Studi Empiris pada UMKM di Wilayah Kab. Brebes)," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 25–37, 2019.
- [5] M. Tuti Alawiyah Andi Yulianto, Anisa Sains Kharisma, Yenny Ernitawati, "Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan di Kabupaten Brebes Tahun 2008-2017 (Studi Empiris pada BPPKAD Kabupaten Brebes)," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 71–80, 2019.
- [6] T. Alfina, A. Kristiana, I. D. Mulyani, K. Iskandar, dan A. Indriyani, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PO Dedy Jaya Brebes Tahun 2016–2018)," *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 23–32, 2019.
- [7] R. R. Rais Puji Rahayu Andi Yulianto, Titi Rahmawati, Slamet Bambang Riono, "Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi pada APBDes Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 38–48, 2019.

PENGALIHAN ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP INFRASTRUKTUR DI DESA KECIPIR
KABUPATEN BREBES

(MUHAMMAD KUNTORO, TITI RAHMAWATI, DWI HARINI, MUHAMMAD BADRUN ZAMAN, AMELIA
SHOLEHAH)

- [8] Murdiono, M. Syaifulloh, R. Setiadi, Roni, dan S. Ikhwan, “Pengaruh Marketing Mix, Kualitas Pelayanan dan Citra Merk terhadap Keputusan Pembelian Produk Piston,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 72–82, 2019.
- [9] Diantoro, A. N. PDW, A. Kristiana, K. Iskandar, dan S. Ikhwan, “Analisis Pengaruh Kompensasi, Motivasi dan Komitmen Affective terhadap Kinerja Karyawan (Studi Empiris di PT Nagamas Surya Kencana Tegal),” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 14–22, 2019.
- [10] N. Firdaus Nuzula Indah Dewi Mulyani, Dumadi, Nur Afridah, “Analisis Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER), Laba dan Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 60–67, 2019.
- [11] N. Khoeriyah, A. Indriyani, I. D. Mulyani, N. Aisyah, dan A. Yulianto, “Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 83–91, 2019.
- [12] S. I. Lili Nur Intan Findhy Dwita Kumala, Roni, Dumadi, “Analisis Kelayakan Usaha Pengolahan Arum Manis UKM Dio di Desa Tegalreja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 95–105, 2019.
- [13] H. K. W. Akhmad Saripin Azizah Indriyani, Anisa Sains Kharisma, Siti Musdalifah, “Analisis Volume Penjualan, Biaya Operasional dan Harga Kamar terhadap Laba Bersih (Studi Empiris pada Grand Dian Hotel Brebes Tahun 2017 – 2018),” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 15–24, 2019.
- [14] Y. E. Erika Oktavia Azizah Indriyani, Titi Rahmawati, Anggi Ayu Saputra, “Pengaruh Biaya Produksi dan Penjualan terhadap Laba Bersih pada Rocket Chicken Brebes,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, hal. 1–14, 2019.
- [15] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. 2021.
- [16] N. Kiman, M. Syaifulloh, A. N. D. Wahana, G. Fitralisma, dan S. B. Riono, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen pada Depot Air Minum Isi Ulang UD Enzes Pengabean,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 92–101, 2019.
- [17] L. Ulfa, A. Yulianto, G. F. Dwi Harini, dan S. Ikhwan, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Disiplin Kerja, Budaya organisasi dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan PD BKK Brebes,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 41–52, 2019.
- [18] N. Fadlilah, S. B. Riono, D. Harini, A. Yulianto, dan Mukson, “Studi Kausal Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 66–71, 2019.
- [19] J. Hikmah, M. Syaifulloh, N. Khojin, N. Aisyah, dan S. B. Riono, “Pengaruh Faktor Kompetensi Individu, Faktor Dukungan Organisasi, Faktor Dukungan Manajemen terhadap Kinerja Pegawai,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 53–65, 2019.
- [20] D. Yoga, A. Indriyani, R. Setiadi, N. Khojin, dan A. Yulianto, “Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Pusat Statistik (BPS) Brebes,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 1–13, 2019.
- [21] L. Istifana, Muhammad, A. N. P. Syaifulloh, H. Sucipto, dan S. Ikhwan, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Pelanggan di Toko Mebel Sinar Jaya, Losari, Brebes,” *J. Econ. Manag.*, vol. 1, no. 1, hal. 3–40, 2019.